

**EVALUASI KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA UNTUK MENINGKATKAN
POTENSI DESA**

(Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013)

SKRIPSI

**DI SUSUN
OLEH :**

**MINARNI
NIM: 118510066**



**PROGRAM STUDI KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

**EVALUASI KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA UNTUK MENINGKATKAN
POTENSI DESA**

(Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013)

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk dapat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

**DI SUSUN
OLEH :**

**MINARNI
NIM: 118510066**

**PROGRAM STUDI KEPERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Untuk Meningkatkan potensi Desa, (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013)

Nama Mahasiswa : Minarni

NIM : 11 851 0066

Program Studi : Studi Pemerintahan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Drs. Mhd. Aswin Hasibuan, MAP
Pembimbing I

Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing II

Mengetahui

Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus :

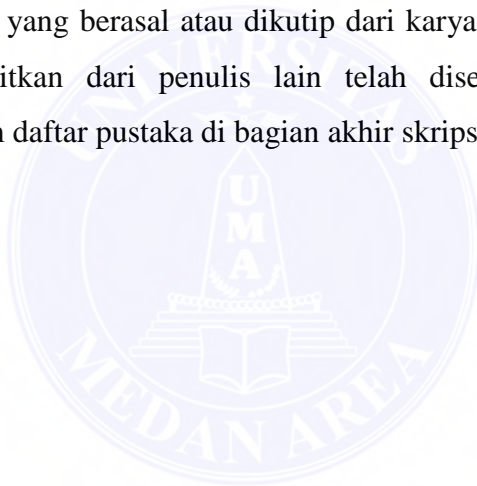
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Minarni

Nim : 11 851 0066

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Untuk Meningkatkan potensi Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013)”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.



Medan, 2015

Minarni
NIM. 118510066

ABSTRAK

Saat ini di tengah menguatnya fokus pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan daerah, melalui berbagai langkah telah dan akan terus di programkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat pembangunan daerah diantaranya melalui pendekatan anggaran. Melalui pendekatan struktur pemerintahan daerah, unit terkecil dari pemerintahan daerah ialah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa dalam kerangka tujuan pembangunan daerah dipandang sebagai objek yang akan dibangun. Pembangunan desa akan berimplikasi terhadap kemajuan daerah sehingga konsentrasi pembangunan desa dalam berbagai pendekatan menjadi penting untuk ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013 dalam Meningkatkan Potensi Desa. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian memperoleh beberapa temuan diantaranya ialah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Hal ini terlihat dari hasil wawancara oleh Ketua LPMD desa Blankahan bahwa dalam penentuan usulan rapat prioritas masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi no coment. Masyarakat beranggapan LPMD tidak bisa berbuat apa-apa.

Kata Kunci : Kinerja, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Blankahan

ABSTRACT

Currently amid the central government's focus on accelerating the development of the region, through a variety of measures have been and will continue to be programmed by the central government as a form of seriousness in accelerating regional development including through budget approach. Through the approach of local governance structures, the smallest unit of local government is a government-run rural village. Village within the framework of regional development goals is seen as an object to be built. Rural development will have implications on the progress of the region so that the concentration of rural development in the various approaches becomes important to be improved. This study aims to look at how the performance of the Institute of Rural Community Empowerment (LPMD) Blankahan Village District of Kuala Langkat Potential Increase in 2013 in the Village. This type of research is qualitative descriptive method. Source data used through interviews, literature study and documentation. Research results obtained some findings of which is the Institute's role as a facilitator of Rural Community empowerment is low this can be seen from the community participation in determining priority program proposals to be made respectively. This is evident from the results of the interview by the chairman of the village LPMD Blankahan that in determining community priorities proposed meeting attended and participated only listened but no coment. LPMD people assume can not do anything.

Keywords: *Performance, Institute of Rural Community Empowerment, Rural Blankahan.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berjudul “Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Untuk Meningkatkan potensi Desa, Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Mhd. Aswin Hasibuan, MAP, selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP selaku Ketua Program studi Pemerintahan. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Seluruh staff dan Dosen Program Studi Pemerintahan, Pegawai FISIP UMA dan rekan-rekan kuliah. Akhirnya tidak terlupakan kepada seluruh keluarga yang selama ini memberikan bantuan dan dorongan yang diperlukan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Medan, November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTARCT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Pembatasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	3
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pemerintahan Desa	5
2.2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	6
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	9
2.4 Kinerja	11
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	16
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data	17
3.4 Informan Penelitian	17
3.5 Teknik Analisis Data	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Kabupaten Langkat	19

4.1.1. Kondisi Geografis.....	19
4.1.2. Kondisi Demografi Penduduk	20
4.1.3. Profil Pemerintahan Kabupaten Langkat.....	22
4.1.4. Profil Desa Blankahan	25
4.1.5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Blankahan	26
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	27
4.2.1. Analisis Kinerja LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) Dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah di Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini di tengah menguatnya fokus pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan daerah, melalui berbagai langkah telah dan akan terus di programkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat pembangunan daerah diantaranya melalui pendekatan anggaran. Disisi lain peran anggaran yang didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tentu dikelola oleh pemerintah daerah di samping keberadaan anggaran daerah yang di peroleh melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah daerah melalui konsep otonomi daerah dan desentralisasi sudah menjadi mungkin sekali untuk mengejar ketertinggalan daerah pada berbagai bidang. Pendekatan anggaran, kegiatan serta pemberdayaan aparatur daerah menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkorelasi terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Melalui pendekatan struktur pemerintahan daerah, unit terkecil dari pemerintahan daerah ialah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa, dalam kerangka tujuan pembangunan daerah dipandang sebagai objek yang akan dibangun. Pembangunan desa akan berimplikasi terhadap kemajuan daerah sehingga konsentrasi pembangunan desa dalam berbagai pendekatan menjadi penting untuk ditingkatkan.

Dalam struktur pemerintah desa, guna mempercepat pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat maka dibentuk lembaga pemberdayaan

masyarakat desa (LPMD) yang fokus terhadap upaya meningkatkan keterampilan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. LPMD sebagai lembaga kemasyarakatan desa, dalam pasal 94 ayat 3 dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan “Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”.

Masyarakat desa dipandang perlu untuk diberdayakan dalam kerangka partisipasi pembangunan desa mengingat minimnya sumber daya manusia pada lingkup desa yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi aktif tersebut dapat melalui berbagai kegiatan yang menyentuh aspek pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di desa. Dari uraian latar belakang masalah ini maka akan dilihat dilakukan evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Untuk Meningkatkan potensi Desa, Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013.

1.2 Perumusan Masalah

Dari pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah diatas maka ditetapkanlah rumusan masalah yang akan di teliti pada penelitian ini yakni :

1. Bagaimanakah kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013 dalam Meningkatkan Potensi Desa.
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Potensi Desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Kinerja LPMD Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang akan di evaluasi ialah target kinerja dan realisasi kinerja.
2. Evaluasi yang dilakukan ialah pada kurun waktu tahun 2013 (satu tahun)
3. Lokasi penelitian ini berada pada kantor LPMD Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Kinerja LPMD Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang akan di evaluasi ialah target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2013.
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Potensi Desa.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Bermanfaat untuk memperdalam pemahaman berbagai pihak yang sedang mengambil studi penelitian berikut metode pada penelitian.
2. Bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam tema lembaga kemasyarakatan desa.

Manfaat praktis

1. Bermanfaat sebagai informasi bagi publik terkait kinerja LPMD Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013

2. Bermanfaat sebagai bahan rekomendasi bagi LPMD Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pemerintahan Desa

Desa dipahami secara umum sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, dan bila dilihat dalam struktur administrasi kewilayahan negara Indonesia maka desa merupakan unit yang terkecil dalam struktur tata pemerintahan. Wilayah desa di kelola oleh pemerintahan desa yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah desa.

Keberadaan pemerintahan desa begitu penting, disamping bertujuan untuk menata pembangunan desa serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa pada aspek lainnya pemerinyahan desa berfungsi memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat desa. Definisi tentang desa di jelaskan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam setiap wilayah desa terdiri dari dusun atau nama lainnya, semakin tinggi jumlah penduduk pada suatu wilayah desa maka dapat dipastikan pemerintahan desa akan lebih bekerja keras untuk memenuhi keperluan masyarakat desa dari pemerintahan desa seperti urusan administrasi kependudukan.

Kewenangan desa dijelaskan pada pasal 18 yang berbunyi :

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Kemudian pasal 19 menjelaskan kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kutipan pasal 18 dan 19 diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa memiliki kewenangan serta tugas yang tidak sedikit juga, sehingga menjadi penting untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam kantor pemerintahan desa.

2.2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan menurut Suhendra (2003:17) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis, mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya. Istilah pemberdayaan menurut Sedarmayanti (2005:47) dipergunakan secara lebih luas oleh berbagai lapisan masyarakat yang berarti mengembangkan potensi ekonomi

rakyat, hakekat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya , sehingga terpelihara tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan berpusat pada masyarakat menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi jika nilai tambah sosial dan budaya masyarakat memiliki kekuatan yang bila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi besar untuk mengatasi masalah yang merekaalami.

Program kemitraan usaha misalnya merupakan program andalan yang dipromosikan pemerintah dalam meningkatkan bentuk intensif lain dari pemerintah disamping memacu investasi swasta dan memperluas kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan keluarga merupakan keharusan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan yang ditandai dengan adanya kemakmuran yaitu meningkatkan konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan

Dalam konsep pembangunan pedesaan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan keberadaanya ialah adanya organisasi dalam unit desa yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa. Organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami sebagai motor penggerak terjadinya transformasi informasi yang dapat mengubah keterampilan masyarakat desa pada titik yang maksimal.

Semakin maksimal keterampilan masyarakat desa maka akan berpengaruh pula terhadap laju pembangunan suatu desa. Keterampilan suatu masyarakat desa dapat dibentuk melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diprakarsai oleh masyarakat desa maupun aparatur desa, untuk memudahkan pengorganisirian pemberdayaan masyarakat desa maka keberadaan organisasi yang

menaungi masyarakat desa dalam proses pemberdayaan menjadi mutlak diperlukan.

Menurut Robbins dan Judge, (2008:5) Organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih dan yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Kemudian pendapat lainnya seperti yang dikemukakan Wibowo (2007 : 1) Organisasi adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

Organisasi-organisasi yang berada pada unit atau lingkup desa secara langsung ataupun tidak langsung turut mengubah pola berpikir masyarakat desa, melalui peran-peran yang melekat pada tujuan organisasi-organisasi yang ada maka turut menambah referensi masyarakat desa terhadap berbagai hal. Berikut ini akan dikutip pandangan menurut Wanashinge dalam Winarno (2003: 109) organisasi desa dapat berperan sebagai :

- a. Identifier, dimana organisasi desa dapat mengidentifikasi tujuan dan strategi pembangunan pedesaan.
- b. Agitator, dimana organisasi desa berperan untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi sebelumnya.
- c. Penggerak sumber daya, dimana organisasi desa dalam memobilisasi tenaga sukarela lokal dan sumber daya eksternal.
- d. Organisator, dimana organisasi desa secara langsung mengimplementasikan program dan kebijakan pembangunan desa.

Secara umum, dapat ditemukan pada banyak pedesaan yang minim dalam hal sumber daya manusia yang terampil atau dengan kata lain dalam kumpulan

masyarakat di desa, sedikit ditemukan aktor-aktor masyarakat yang terampil dalam mengorganisir organisasi yang berkaitan dengan pembangunan desa. Pada kondisi ini, peran dari pemerintah desa diharapkan sebagai pemerakarsa terbentuknya aktor-aktor masyarakat desa yang terampil dalam berorganisasi di bidang pembangunan desa. Esman dalam Eaton (1986 : 24) menyatakan bahwa pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan dan bimbingan bagi organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka menuju pembangunan desa dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, namun pendekatan-pendekatan yang akan digunakan akan berkaitan secara langsung dengan masyarakat desa, dengan demikian keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan desa menjadi kunci utama untuk menuju pembangunan desa yang bergerak secara cepat.

Keberadaan masyarakat desa tidak selalu secara otomatis akan dapat memberikan efek positif dalam proses pembangunan desa, efek positif dari masyarakat desa dapat terwujud bilamana masyarakat desa telah memahami setidaknya peran mereka dalam konsep pembangunan desa, sehingga diperlukan diskusi ataupun komunikasi-komunikasi dua arah sebagai media sosialisasi kerangka konsep pembangunan desa.

Dengan diskusi atau komunikasi dua arah yang telah terjalin antara pemerintahan desa dengan masyarakat maka selanjutnya masyarakat yang belum memahami peran mereka untuk selanjutnya di beri pemahaman secara lebih intensif sambil proses pembangunan berjalan berupa pemberdayaan masyarakat pada pembangunan desa.

Menurut Machendrawati dan Syafi'I (2001 : 29) pengembangan masyarakat secara etimologi, pengembangan adalah membina dan meningkatkan kualitas hidup. Menurut Wiradji seperti dikutip Rahmat (2003: 54), pengembangan masyarakat merupakan proses pembangunan kesadaran kritis yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, sistematis dan berkesinambungan melalui pengorganisasian dan peningkatan kemampuan menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk mengarah pada perubahan kondisi hidup yang semakin baik sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

Pemberdayaan masyarakat di perlukan dalam ranah pembangunan daerah Dye (1992), kebijakan publik diartikan sebagai "*Whatever government choose to do or not to do*". Dalam pandangan Dye ini di simpulkan kebijakan sebagai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Untuk melakukan suatu pelaksanaan kebijakan publik, secara umum dalam tataran implementasi akan terlebih dahulu disusun melalui program-program dalam mencapai tujuan kebijakan publik tersebut.

Program dalam pandangan Jones (1984) adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dengan merujuk pada teori Jones, maka bisa dikatakan program menjadi wajib untuk di ciptakan sebagai bagian yang tidak dapat di pisahkan dari suatu kebijakan yang diambil atau dengan arti lain program sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan kebijakan seperti yang di utarakan oleh Jones.

Keberhasilan pelaksanaan program terletak pada pelaksana program itu dan sasaran program itu sendiri. Pelaksana program juga harus memperhatikan

dan menyerap pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan program dapat lebih mudah di laksanakan atau dengan kata lain lebih banyak yang terlibat dalam pelaksanaan program maka berpengaruh terhadap keberhasilan program.

Salah satu program yang sering dilakukan ialah seperti program pembangunan infrastruktur, program pembangunan seperti hal ini akan berkaitan dengan anggaran dan tenaga kerja. Pelibatan masyarakat dalam program seperti ini akan memudahkan dalam pencarian anggaran dan kecepatan laju pelaksanaan program. Pengertian infrastruktur menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Pandangan Grigg (1988) diatas memperjelas akan keberadaan dari banyaknya program pembangunan infrastruktur dalam lingkup pembangunan daerah merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan karena berkaitan dengan laju pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Kodoatie (2005), infrastruktur sebagai pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dilaksanakan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh. Dengan kata lain efek positif dari pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi sukseki efek dari pembangunan dalam bidang lainnya.

2.4 Kinerja

Suatu organisasi atau perusahaan jika ingin maju atau berkembang maka dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang

ditetapkan oleh perusahaan. Untuk memperoleh pegawai yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan kinerja.

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya dapat bersifat *tangible* (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau *intangible* (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar individu pegawai.

Mangkuprawira dan Hubeis dalam bukunya Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia (2007:153) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan Mangkuprawira dan Hubeis (2007:160) menyebutkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik pegawai.

Faktor – faktor intrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan spiritual. Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik, kepemimpinan, komunikasi vertical dan horizontal, kompensasi, kontrol berupa penyeliaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, system hukuman dan sebagainya.

lebih lanjut Mangkuprawira dan Hubeis (2007:155)menguraikan faktor-faktor tersebut sebagai berikut : a) Faktor Personal, faktor personal pegawai meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri,motivasi

dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu, b) Faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan dan team leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja kepada karyawan, c) Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu team, kepercayaan terhadap sesama anggota team, kekompakan, dan keeratan anggota team, d) Faktor Sistem, meliputi system kerja, fasilitas kerja dan infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, kompensasi dan proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi, e) Faktor Kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Definisi lain datang dari Murpy dan Cleveland dalam Pasolong (2007:175) mengatakan bahwa, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa kinerja pegawai dalam sebuah organisasi ditentukan oleh sikap dan perilaku pegawai terhadap pekerjaannya dan orientasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut. Kinerja menurut Amstrong dan Baron (1998:159) seperti dikutip oleh Wibowo (2008:222) adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Menurut Simanjuntak (2005:221), definisi kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu kompetensi individu orang yang bersangkutan, dukungan organisasi, dan dukungan manajemen (Simanjuntak, 2005:210). Dari definisi-definisi tersebut kinerja

merupakan suatu hasil dari tindakan seorang pekerja sesuai dengan pekerjaannya dan diawasi oleh orang-orang tertentu yaitu seorang atasan atau pimpinan dan dukungan dari organisasi.

Hasil kerja suatu organisasi pada umumnya disebut dengan istilah kinerja, kinerja menurut Peter Jennergren dalam Nystrom dan Starbuck (1981: 43) makna dari performance (kinerja) adalah pelaksanaan tugas-tugas secara aktual. Kinerja yang maksimal selalu diharapkan dapat terlaksana oleh setiap organisasi, pencapaian kinerja maksimal biasanya begitu diharapkan oleh pemimpin pada suatu organisasi. Antara kinerja maksimal terhadap peningkatan capaian kerja organisasi memiliki korelasi yang kuat untuk meletakkan target-target selanjutnya dari organisasi. Namun kinerja tidak selalu akan berdampak seperti apa yang diharapkan atau dengan kata lain kinerja terjadi namun tidak begitu sesuai bagaimana semestinya sehingga kinerja perlu di ukur efektivitasnya.

Menurut Corrado (2004:135), efektivitas kerja adalah fungsi dari peraturan-peraturan dan praktik-praktik yang digunakan perusahaan dengan konsisten. Bentuk-bentuk konsistensi ini sebagai sumber kekuatan organisasi dan sebagai cara untuk memperbaiki kinerja dan efektivitas organisasi.

Menurut Pabundu (2006:16), efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan manajemen yang efektif disertai dengan manajemen yang efisien. Siagian (2002:151) mengatakan bahwa efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai

baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, cara melaksanakan, dan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang diperoleh akan dipresentasikan melalui kata-kata, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2012:11), bahwa “metode kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.”

Sedangkan metode penelitian kualitatif itu sendiri diartikan Sugiono (2014:1) sebagai “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kantor lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan waktu tempuh penelitian sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) bulan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang sedang diteliti atau melihat apa saja yang terjadi terhadap objek yang sedang diteliti tersebut.
- b. Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan-informan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

3.4. Informan Penelitian

Penelitian ini menetapkan informan penelitian dengan ciri-ciri atau karakteristik yang memahami dan memiliki relevansi terhadap kebutuhan data dan informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun jenis informan pada penelitian ini yaitu :

1. Informan kunci, informan kunci pada penelitian ini ialah Kepala Desa, Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013.
2. Informan Utama pada penelitian ini ialah Kepala lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013.
3. Informan Biasa pada penelitian ini ialah perwakilan masyarakat Desa Blankahan yang pernah berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat desa.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah Deskriptif, melalui teknik deskriptif akan di kumpulkan berbagai data dan informasi yang di peroleh selama penelitian lalu kemudian akan di interpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan. Triangulasi sebagai teknik untu mengukur keabsahan data, diharapkan melalui teknik triangulasi akan terjadi konfirmasi data informasi yang dapat tersaji secara berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3
- Corrado, Frank. M. 2004, Berkomunikasi Dengan Karyawan, Cetakan Pertama, PPM : Jakarta.
- Dye, Thomas R., 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Englewood Cliffs
- Eaton, Joseph W. 1986, Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional Dari Konsep Ke Aplikasi, UI Press, Jakarta.
- Grigg, Neil, 1988. *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley and Sons.
- Hasibuan, Melayu. S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta : Rajawali Press
- Kodoatie, Robert, 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Machendrawati, Nanih dan Agus Ahmad Syafi'i. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam, Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Mulyono, Deddy. 2001. *Perencanaan dan Pengendalian Program pembangunan*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nystorm and Sturbuck, ed. 1981. *Hand Book of Organization Design*. Oxford : University Press
- Pabundu, Moh. Tika. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Cetakan pertama, PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Rahmat, Abdul. 2003. *Andragogi dan Pengembangan Masyarakat*, Jurnal PMI Vol 1 No. 1. September.

Robbins dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Siagian, Sondang. P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, PT Bumi Aksara: Jakarta

Sunyoto Usman, 2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja, Edisi Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Winarno, Budi. 2003, Komparsi Organisasi Pedesaan Dalam Pembangunan, Media Presindo. Jakarta

Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat.

